



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 05.A
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Pangandaran telah diatur dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 5.A Tahun 2017;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 05.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 05.A TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN
PANGANDARAN

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 05.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pangandaran diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, selengkapnya Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) terdiri atas:

- a. Bupati Pangandaran;
- b. Wakil Bupati Pangandaran;
- c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran;
- d. Komandan Distrik Militer Ciamis;
- e. Kepala Kepolisian Resort Ciamis;
- f. Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis;
- g. Sekretaris bukan anggota: Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, selengkapnya Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk menghimpun dan menyusun bahan-bahan, serta memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dibentuk Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran.
 - b. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pangandaran.
 - c. Wakil Ketua II : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran.

- d. Sekretaris : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran.
- e. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pangandaran;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Pangandaran.
3. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Kabupaten Pangandaran;
4. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 11 Januari 2021
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 11 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd
H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021 NOMOR 9